

MSINTEGRASI UNI SOVIET DAN NEGARA-NEGARA BAGIANNYA

F. Iriani Sophiaan Yudoyoko



F. Iriani Sophiaan Yudoyoko adalah pengajar mata kuliah Sistim Politik Uni Soviet dan Eropa Timur pada PISIP Universitas Indonesia. Sejak tahun 1988 menjabat sebagai Asisten Direksi bidang Administrasi Keuangan dan Staf peneliti pada Pusat Antar Universitas bidang Ilmu-ilmu Sosial, Universitas Indonesia. . •

ndahuluan

ASALAH nasionalisme yang menyebabkan iintegrasi di Uni Soviet sekarang ini bu-nlah hal baru bagi negara itu. Sesungguh-a sudah sejak pemerintahan Tzar per-alan ini merupakan masajah yang meng-nggu. Hanya saja karena adanya pemerin-lan yang kuat, sentralisitis, monopolists, n opresif maka tun Hi tan itu dapat ditekan bawah permukaan. Baru kemudian di wah periode keterbukaan dan demokra-ssi ini, persoalan tersebiit muncul keembali.

Meniirut perkiraan, ketika ide demokra-isi akan dimulai di Uni Soviet, Gorbachev ah memperhitungkan bahwa persoalan in! an Hmbul kembali. Tetapi seperti diketa-i, ia tidak dapat menghindari dari proses trukturisasi dan demokratisasi karena si-is i sosial dan ekonomi negara itu tidak ndukung diteruskannya sistem sentral-si.

Perkiraan itu kemudian menjadi kenya-taan ketika sistem sentralisasi Gorbachev semakin mengendur dengan membiarkan komunisme runtuh satu per satu di Eropa Timur, gelombang protes dan tuntutan otonomi di negara-negara bagian mengambil bentuknya secara terbuka. Dimulai dengan tuntutan kemerdekaan tiga negara Baltik ya-itu Lithuania, Estonia, dan Lathvia kemudian diikuti oleh kerusuhan etnis di Armenia, Adzarbajian, Kazhakstan, dan negara-negara bagian di selatan lainnya, serta negara-negara bagian di sebelah utara yaitu Georgia, Ukraina, Maldovia. Bahkan etnis Rusia sen-din, yang selama ini dianggap mend a pat perlakuan istimewa dari pemerintah pusat turut mengajukan tuntutan yang sama.

Di tahun 1990, frekuensi dan derajat tuntutan-tuntutan dan kerusuhan-kerusuhan di negara-negara bagian nampaknya semakin meningkat, sehingga memaksa Gorbachev mengadakan referendum di bulan Maret 1991. Kesempatan itu menawarkan pilihan kepada negara-negara bagian untuk

ini ditulis pada bulan Desember 1991.

tetap tinggal atau melepaskan diri ,dari Uni Soviet. Kebijakan itu dianggap terlalu lunak oleh kaum konservatif komunis, dan menjadi salah satu pendorong kudeta di bulan Agustus 1991 yang lali.¹ Kudeta tersebut gagal, tetapi telah mempercepat proses di Integrasi di Uni Soviet. Mula-mula tiga negara Baltik menyatakan kemerdekaannya dan kemudian diikuti oleh pernyataan kedaulatan dua bekas negara bagian Uni Soviet lainnya,

Berbagai usaha diupayakan oleh Gorbachev untuk mempertahankan keberadaan negara ini dalam peta politik dunia. Akan tetapi, di akhir tahun 1991 dengan pernyataan pembentukan Negara Persemakmuran Merdeka dari tiga negara terbesarnya, yaitu Rusia, Ukraina dan Beylorusia, maka disintegrasi Uni Soviet sudah tidak dapat dicegah lagi.

Jika kita mempertimbangkan soliditas dan keperkasaan pemerintahan komunis selama 7 dekade ini, sulit rasanya dimengerti bahwa negara itu terus-menerus menghadapi masalah etnis dan tuntutan otonomi seperti di atas. Dengan demikian lalu timbul pertanyaan, faktor apa kiranya yang menyebabkan melekamya masalah itu dalam tubuh Uni Soviet?

Permasalahannya memang begitu kompleks. Sebagian orang melihat bahwa gerakan sentrifugal yang terjadi di Uni Soviet belakangan ini adalah merupakan dampak lanjutan dari kegagalan ekonomi di negara itu. Kegagalan mana diakibatkan oleh sistem trailsasi yang ketat, birokratisasi yang berlebihan dan politik hegemoni yang dilaksanakan. Untulk sebagian, pendapat itu memang benar. Tetapi terdapat faktor lain yang tersembunyi (*laten*), yang kemudian mejedak dengan kegagalan ekonomi tadi.

Sebab lainnya yang lebih kuat adalah dihapusnya pasal 6 Konstitusi Uni, Soviet yang menyebutkan tentang **monopoli** partai atas segala kehidupan negara. Temui Konstitusi Uni Soviet secara lengkap dalam Gordon 6. Smith, *Soviet Politics-Conlivity and Contradiction*, (Macmillan Education Ltd, 1988), Mm. 349-351.

Tulisan ini mencoba menjelaskan faktor-faktor laten tersebut dengan mengemukakan tiga variabel yang saling mempengaruhi. Pertama adalah faktor *sejartih pembentukan negara Uni Soviet*; kedua adalah manajemen etnik yang sering disebut sebagai proses *rusifikasi*; ketiga adalah *manajemen kubungan antara pusat dan daerah*. EH samping itu terdapat satu faktor lain yang menyebabkan meningkatnya masalah ini menjadi gerakan disintegrasi adalah *redupnya kekuasaan peme-rintahan pusat* akibat konflik di antara elit yang dimulai sejak paruh akhir tahun 80-an dan mencapai puncaknya dipenghujung dekade 90 ini.

Untuk mengarahkan pembaca agar dapat mengerti tentang proses disintegrasi yang terjadi di Uni Soviet belakangan ini, penulis merasa perlu untuk terlebih dahulu menjelaskan secara garis besar tentang konsep integrasi nasional. Selain daripada itu, tulisan ini dimaksudkan agar diperoleh perbandingan dengan situasi dan kondisi Indonesia yang memiliki beberapa persamaan. Dari-padanya diharapkan dapat diperoleh pelajaran untuk mempertahankan integrasi negara ini. •

Fengertian Integrasi Nasional

Integrasi nasional adalah suatu proses peleburan berbagai perbedaan politik, ekonomi, sosial dan budaya yang ada di dalam lingkup wilayah kesatuan negara-bangsa menjadi satu kesatuan masyarakat yang terpadu. Integrasi nasional merupakan salah satu prasyarat bagi keutuhan suatu negara-bangsa. Oleh karena itu adalah menjadi fungsi dan tugas dari pemerintahnya untuk memilih atau menciptakan kebijaksanaan yang mendorong terjadinya,pelebiiran tersebut. Proses ini bisa terjadi secara alamiah, akan tetapi cenderung memakan waktu yang lama, bisa juga dipercepat dengan jalan paksaan. Sering kali, oleh berbagai sebab dan kendala, proses ini malahan berkembang ke arah yang sebaliknya, yaitu disintegrasi.

Tujuan mencapai integrasi nasional dapat dilakukan secara vertikal maupun horison-Dalam pengertian ini, integrasi vertikal bertujuan untuk menjembatani celah perbedaan yang mungkin ada antara elit dan massa atau juga antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sementara integrasi horizontal bertujuan untuk mengurangi perbedaan dan ketegangan dari berbagai kultur daerahan yang ada. Baik vertikal maupun horizontal pada akhirnya merupakan suatu proses menciptakan suatu masyarakat politik yang homogen.

Banyak teori yang dikembangkan oleh pakar pembangunan politik untuk menciptakan integrasi nasional. Myron Weiner misalnya mengatakan bahwa terdapat 2 pendekatan untuk mencapai tujuan di atas. Pendekatan yang pertama disebutnya sebagai *persifid dalam keanekaragaman* dan yang kedua adalah *asimilasi*. Yang dimaksudkan dengan pengertian pertama adalah usaha membentuk kesetiaan nasional tanpa mengabaikan kebudayaan kelompok-kelompok minoritas. Dalam hal ini identitas suku atau golongan minoritas tetap diakui sebagai identitas nasional sebagaimana halnya dengan golongan mayoritas. Sementara yang dimaksud dengan asimilasi adalah pencaharian integrasi dengan menjadikan kebudayaan suku bangsa yang dominan dalam suatu negara sebagai kebudayaan nasional, di mana bisa dicapai dengan jalan menundukkan identitas suku atau golongan minoritas-kepada suku yang dominan.

Sementara itu, di Uni Soviet terdapat 2 pendekatan yang hampir serupa dengan pendekatan di atas, di mana integrasi nasional dapat dicapai melalui 2 kemungkinan. Yang pertama adalah *Sblizhenie* yang berarti mencapai integrasi dengan tetap memelihara identitas kesukubangsaan tetapi mempernihilkan perbedaan dalam ekonomi dan sosial

di antara etnis, sehingga mencegah kemungkinan munculnya sentimen kebangsaan. Yang kedua adalah *Sliiani* berarti menghilangkan perbedaan dengan mencaharian peleburan suku-suku bangsa menjadi satu kultur yang seragam. *Sblizhenie* dalam hal ini mungkin bisa disejajarkan dengan persatuan dalam keanekaragaman, sementara *Sliiani* mendekati pengertian asimilasi.

Di dalam pengertian yang pertama, bisa dikatakan terkandung unsur-unsur yang bersifat alamiah yang membiarkan peleburan perbedaan antara suku-suku bangsa berjalan secara perlahan dan stabil. Dalam pengertian kedua, tampaknya lebih banyak bersifat paksaan. Sebab adanya persyaratan melepaskan identitas kesukuan secara total. Karena itu maka dalam proses yang kedua, dibutuhkan prasyarat yang menyertainya yaitu adanya suatu pemerintahan yang kuat yang didukung oleh militer yang kuat pula.

Secara lebih khusus, salah satu dimensi dari kebijakan integrasi nasional adalah politik. Di sini pemerintah dituntut untuk mencaharian formula yang akan membuat rakyat tunduk dan patuh pada tuntutan negara, dan meningkatkan konsensus normatif yang mengatur tingkah laku politik masyarakat atau individu-individu yang ada di dalamnya. Bila dikaitkan dengan pendekatan asimilasi tadi, maka dalam proses yang kedua, konsensus sikap dan kepatuhan dari masyarakat akan tumbuh, stabilitas akan tetap hadir, akan tetapi bersifat lemah, dan rawan. Dan bila kondisi ini yang berkembang, maka pada saat masyarakat melemah peluang untuk mencetuskan ketidaksepakatannya pada kelompok atau kultur yang berbeda, prosesnya akan meluas ke arah kerusuhan

lihat Myron Weiner, *Political Integration and Political Development* dalam Nazaruddin Syamsuddin, *Integrasi Politik di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1987, hlm. 6.

ini tersebut berasal dari Peter Zwick, *Soviet Nationality Policy: Social, Economic, and Political Aspect*, dalam Gordon B. Smith, ed. *Public Policy and Administration in the Soviet Union* (New York: Praeger, 1980) hlm. 144.

etnis, antar golongan, dan lebih tinggi lagi ke disintegrasi.

Proses inilah yang sekarang terjadi di Uni Soviet. Dengan mengacu kepada konsep di atas kita akan mengerti mengapa ke-4 variabel yang disebut sebelumnya penulis kemukakan.

Sejarah Pembentukan Uni Soviet

Ditinjau dari sejarah pembentukannya sesungguhnya Uni Soviet menunjukkan kelemahannya dalam membangun integrasi nasionalnya. Jika diperhatikan secara seksama, Uni Soviet merupakan suatu negara supranasional yang memiliki kriteria sosiologis sebuah imperium. Negara ini terbentuk dari ratusan ras dan etnik, yang tersebar di 15 negara bagian. Bergabung "di bawah Uni Soviet bukan atas kehendak sendiri, melainkan sebagai warisan dari Imperium Rusia. Lebih jauh kebelakang, penggabungan dengan imperium Rusia bukan atas kesepakatan bersama, melainkan sebagai negara taklukan dimasa lalu. Baik melalui jalan kekerasan atau lewat perjanjian-perjanjian rahasia.

Sejarah revolusi Oktober 1917 yang menjadi landasan kemenangan Uni Soviet sebagai suatu negara-bangsa dapat dikatakan bukanlah semata-mata suatu revolusi sosial semacam yang dimaksudkan oleh Marx (proletarisme menjatuhkan kapitalisme/imperialisme). Tetapi lebih merupakan revolusi etnik melawan imperium Tzar untuk melepaskan diri dari penjajahan dan kebijakan Rusifikasi Tzar. Satu alasan mereka bergabung dengan kelompok Bolshevik adalah karena kepandaian Bolshevik menempatkan kepentingan yang sama dengan kelompok etnik tersebut. Yaitu, janji pembebasan dari tekanan dan upaya Tzar mengubah mereka menjadi bangsa Rusia, serta ideologi Marx yang menjanjikan persamaan dan pemerataan.

Bolshevik dalam hal ini telah mempersiapkan jauh sebelum revolusi Oktober terjadi.

Sejak 1903 kelompok ini telah memproklamirkan program partai yang menekankan pada hak-hak untuk menentukan nasib sendiri dan pemerintahan otonomi bagi kelompok nasionalistis yang hidup di imperium Rusia (baca tentang hal ini dalam buku Lenin yang berjudul *What is to be done*),

Di tahun-tahun pertama pemerintahan Lenin, ia menempatkan hak-hak yang dijanjikan kepada semua etnik (negara-negara bagian) di dalam konstitusi Uni Soviet. Ia memberikan hak hidup swastanisasi dalam konsep N.E.P (*New Economic Policy*)-nya. Ia member! kelonggaran-kelonggaran politik dalam demokrasi sentralismenya dengan memungkinkan kelompok lain (misalnya Menshevik) untuk ikut serta dalam politik, meskipun dominasi ada di tangan partai komunis.

Tetapi kondisi keanekaragaman Soviet saat itu nampaknya tidak sesuai dengan kelonggaran-kelonggaran yang diberikan oleh Lenin. Situasi ketidakstabilan meningkat berbagai oposisi dan gerakan nasionalisme muncul yang pada akhirnya menghambat proses penyatuan (integrasi) negara itu menjadi satu kesatuan negara-bangsa.

Stalin, sebagai penguasa selanjutnya, merasa perlu adanya pembatasan-pembatasan hak agar tercapai stabilitas politik yang akan menunjang kekuasaan partai komunis. Ia kemudian memperketat sentralisasi, mengeksekusi setiap oposisi yang muncul, sehingga ia terkenal sebagai pembantai 20 juta rakyat Uni Soviet. Dalam kerangka integrasi Nasionalnya, ia kemudian mengambil alih kembali ide Rusifikasi dari Tzar Nicholas II kepada negara-negara bagian di dalam konstitusinya,

Manajemen Etnik dan Kebijakan Rusifikasi 1930-1980

Rusifikasi mempunyai arti harafiah sebagai penyatuan berbagai kebudayaan ke dalam budaya Rusia (= Rusianisasi) baik bahasa,

senian, pendidikan, dan kebudayaan pada umumnya.

Terdapat beberapa alasan mengapa Stalin mengambil kembali ide Rusifikasi dari Tsar Rusia ini. Pertama adalah alasan politis yang disebut sebelumnya, yaitu untuk mempercepat integrasi dan stabilitas. Di dalam pandangannya, kebangsaan (nation) atau kelompok kebangsaan adalah:⁴

Hasil pembentukan sejarah terhadap komunitas rakyat yang secara ajeg (stable) dibentuk melalui kebersamaan bahasa, teritorial, kehidupan ekonomi, dan *polesan psikologis* (psychological make-up) yang kemudian terwujud menjadi satu bentuk kesatuan budaya.

Jika dilihat dari pernyataan itu, maka Stalin mengubah Uni Soviet dari negara *supra nasional* menjadi suatu negara yang lebih menekankan pada *slitiane dari-da sblizherie* (lihat him. 71), yaitu melebur berbagai kesuku-bangsaan ke dalam kesatuan budaya dan bahasa suku dominan dengan tujuan membentuk pola pikir dan kepentingan nasional yang sama. Jelas bahwa pertimbangan ini menyimpang dari tujuan revolusi dan dogma Marx tentang kesetaraan dan pemerataan. Jelas bahwa pertimbangan ini bertentangan dengan konsistensi Soviet yang memuat tentang hubungan antara pusat dan daerah dan hak menentukan nasib sendiri. Jelas pula bahwa pertimbangan ini lebih bersifat pragmatis, untuk kepentingan pemerintah pusat dalam mempertahankan kekuasaannya. Selanjutnya Stalin melihat bahwa secara geografis dan demografis Rusia adalah yang besar dan terkuat selama masa Tsar dan

berarti juga di bawah pemerintahan komunistik. Luas daerah Rusia meliputi 76.2% dari total luas Uni Soviet,⁶ sedangkan suku bangsa Rusia meliputi 51.4%.

Pada saat memulai kebijaksanaan Rusifikasi, Stalin beranggapan bahwa Rusifikasi telah berlangsung di masa Tsar, oleh karena itu semua etnik paling tidak telah melampaui proses adaptasi dengan kultur Rusia. Oleh karena itu tentu telah terproses suatu kultur kebersamaan baru dengan berpatokan pada kultur Rusia/ sehingga ia tinggal meneruskan dan memperkuat saja. • Di bawah pemerintah Stalin, Rusifikasi dilakukan dengan paksaan dan ancaman senjata, dan dalam berbagai berbagai bentuk. Yang paling utama adalah mengontrol secara politis, semua unsur pendidikan, media massa dan informasi. Ini berarti semua penerbitan dan buku-buku harus dalam bahasa Rusia. Menjadikan bahasa Rusia sebagai bahasa nasional. Mewajibkan kepada seluruh negara bagian untuk memakai bahasa Rusia di sekolah-sekolah dari mulai taman kanak-kanak sampai SLTA. Pada jenjang ini bahasa lokal masih diperkenankan akan tetapi ditempatkan sebagai bahasa kedua. Sementara di universitas, bahasa Rusia adalah bahasa wajib (kecuali untuk wilayah Ukraina, Georgia dan Latvia). Bahasa daerah dalam hal ini tidak dapat digunakan dalam komunikasi yang bersifat formal baik lisan maupun tertulis. Di dalam kehidupan sehari-hari tampaknya promosi jabatan juga ditentukan oleh kemampuan seseorang dalam berbahasa Rusia.

Kebijaksanaan ini tampaknya cukup berhasil. Dari sensus tahun 1979, diperoleh data bahwa 75 persen penduduk Uni Soviet kini telah mampu berbahasa Rusia.

Cara lain yang ditempuh adalah dengan

⁴. Stalin, "Marxism and Nationality Question" dalam *Selected Works*, vol. 2 (Moscow: Politizdat) 1955, him.

International Herald Tribune, August 31-September 1, 1991, him. 4.

bawah Stalin, Pelaksanaan kebijaksanaan Rusifikasi yang hanya terbatas dalam teritorial Uni Soviet saja, telah meluas ke Eropa Timur.

TPeter Ruthland, "The Nationality Problems and The Soviet State", dalam buku Neil Harding, ed., *The State Socialist Society* (London: Macmillan, 1984) him. 164. •

, melakukan transmigrasi penduduk dari satu negara bagian ke negara bagian lainnya (pada sejumlah imigran, hal ini dilakukan secara sukarela karena dipengaruhi oleh gaya hidup modern). Penyebaran etnik Rusia dianggap paling tinggi persentasinya yang dampaknya masih terasa sampai sekarang. Data menyebutkan bahwa di Estonia, Latvia dan Lithuania yang telah melepaskan diri, sekitar 30 persen dari penduduknya adalah etnik Rusia. Di Ukraina 10 juta dari 51 juta penduduk, Di Kazakstan 6,3 juta dari 16,7 juta penduduk, di Kirghizia 946.000 dari 4,4 juta penduduk. Penyebaran ini belakangan banyak membantu pemerintah pusat dalam mengatasi kerusuhan-kerusuhan etnis. Misalnya ketika sebelum kudeta wilayah Baltik mencoba melepaskan diri, pemerintah pusat telah menggunakan penduduk beretnis Rusia untuk mendukung pemerintah pusat dalam mempertahankan wilayah itu. Dari pemberitaan koran-koran dapat dibaca terjadi unjuk rasa Etnis Rusia menentang kemerdekaan Baltik, atau ketika pemerintah pusat menggunakan etnis Rusia di Ukraina Georgia dan Moldova untuk menahan terlepasnya negara bagian itu.

Bentuk Rusifikasi lainnya adalah kebijakan-pindahan pindah-tukar antara-etnik yang satu dengan yang lainnya, dari negara bagian yang satu ke negara bagian lain. Ini dilakukan tanpa pertimbangan kecocokan dan kemungkinan adaptasi dalam kultur, dan tentu saja menyimpan benih-benih perselisihan antar-etnis. Contohnya transmigrasi suku Georgia ke Azerbaijan, atau bangsa Armenia yang diharuskan meninggalkan tanahnya ke beberapa negara bagian lain. Akibat kebijaksanaan ini bisa tampak diperlihatkan sekarang ini antara lain berupa kerusuhan etnis yang terjadi antara Armenia dan penduduk asli di Azerbaijan, yang meskipun keduanya beragama Islam, tetapi

berbeda dalam bahasa dan kebiasaan-kebiasaan.

Pemerintah komunis juga melakukan tekanan kepada pejabat-pejabat partai di daerah untuk mendesak warganya melakukan perkawinan campuran antar-etnik dengan tujuan mengurangi kekentalan etnik-etnik tersebut. Sebagai akibatnya, penguasa di: Azerbaijan diharuskan untuk membaurnya Islam Tats yang berbahasa Iran dengan Talyches. Pemerintah Georgia memakai cara yang sama terhadap suku bangsa minoritas Iberian (Mingrelians, Swans, Adzary) dan non-Iberian (Ossets, Abkhaz). Penguasa di Uzbek memaksakan pembauran suku bangsa Tadjik di wilayah Uzbekistan dan sebaliknya penguasa di Tadjikistan memaksa: hal yang sama pada Suku Uzbek di wilayahnya. Dan banyak lagi contoh-contoh seperti itu.

Berbagai cara yang ditempuh di atas mungkin merupakan hal yang lazim dilakukan oleh suatu negara yang terdiri dari berbagai etnis di dunia ini, di dalam rangka integrasi nasionalnya. Proses ini mungkin tidak akan menimbulkan masalah bila tidak terjadi ekses atau ketidak-adilan dalam manajemen etnik. Pada kenyataannya kebijakan-pindahan melebur unsur-unsur non-Rusia di satu pihak, diiringi pula dengan tindakan memperbesar dan memberikan keistimewaan bagi etnis Rusia di lain pihak.

Pendapat ini berkaitan erat dengan kebijakan-pindahan pemerintah pusat menempatkan! identifikasi etnik sebagai

issue penting dalam] ad mini trasi formal dap-tiap warga negara.] Dalam proses kenegaraan Uni 'Soviet, identi-tas etnik menjadi prasyarat yang harus dicantumkan dalam surat kelahiran dan-

sura t-surat identitas (KTP) 'yang harus dimiliki seseorang sejak ia berusia 16 tahun. Kesukubangsaan menjadi pertimbangan dalam waktu-waktu penting dalam hidup se-

Intefnaitan Herald Tribune, August 28 1991, him.

1.

A.M. Khazanov, "The Current ethnic Situation in the USSR: Perennial Problems in the Period of Restructuring": *Nationality Paper*, (fall 1988, Vol. XVI/Number 2); hlm.149-150.

74



seorang, seperti masuk universitas, mencari pekerjaan, promosi jabatan, atau masuk menjadi anggota partai. Dalam hal ini, ketidak-adilan tersebut muncul karena pri-oritas selalu diberikan bagi suku bangsa Rusia. Kenyataan ini tidak hanya terjadi di jajaran pemerintahan, tetapi di semua segi kehidupan. Baik di *kolhozy* (sistem pertanian kolektif), di *savkhozy* (sistem pertanian pe-merintah), di industri-industri atau tempat-tempat lainnya. Dari sekian banyak, terdapat

- atu atau dua etnis non-Rusla yang berke-
- empatan menduduki posisi-posisi tertentu, tetapi itu dimungkinkan karena hubungan-in-hubungan istimewa atau karena kemam-»uan individu membangun hubungan de-igan figur-figur yang kuat di pusat. Contoh yang dapat diberikan di sini adalah Shelest dari Ukraina, Rashidov dari Uzbekistan, atau Cunaev atau Nazarbayev dari Kazakhstan.

Pengaturan etnik semacam itu menyebabkan tingkat perekonomian dan pendidikan etnis Rusia di teritorial mana pun mereka >erada jauh lebih tinggi dari etnis lainnya. Iebagai konsekuensi kondisi ini, terdapat >embenaran untuk memberikan jabatan-ja-atan yang tinggi kepada suku bangsa Rusia karena pendidikan). Pemberian jabatan-ja->atan tinggi kepada etnik Rusia juga di-riungkinkan karena promosi pejabat daerah (di semua bidang) disentralisasikan di pusat tau lebih tepatnya ditunjuk oleh pusat/par-li (baca ten tang hal ini lebih jauh pada lasalah *interlocking* di ha l a man. 77).

Sementara itu, seseorang tidak dapat me-gubah identitas kesukuan melalui surat. idak juga karena perubahan domisili terito-al meskipun seseorang telah bertempat nggal lebih dari 10 tahun di negara bagian

- rtentu. Identitas kesukuan hanya dapat erubah bila seseorang mehikah dengan jku bangsa lain, di mana si anak dapat lemilih ikut kesukuan ibu atau ayah, tngan janji masa depan yang lebih baik

bagi Etnik Rusia, banyak kaum muda yang akhirnya memilih pembauran melalui pemi-kahan dengan etnis Rusia, meskipun tidak terjadi secara merata.

Dengan manajemen etnik seperti di atas, yaitu Rusifikasi, transmigrasi, perkawinan atau memberikan perlakuan istimewa bagi etnis Rusia, pada porsi tertentu integrasi nasional dapat dicapai secara lebih cepat Akan tetapi pada sisi lain porsi yang lebih besar terbentuk yaitu munculnya kesenja-ngan sosial dan ekonomi antara Rusia dan non Rusia yang pada akhirnya menimbulkan dendam nasional is me di antara etnis hon-Rusia.

Dalam proses perkerrtbangan masyarakat-nya, sudah sejak sebelum Perang Dunia II terjadi gerakan-gerakan nasionalisme me-nentang Rusifikasi. Tetapi sebagaimana dike-tahui, semua bentuk oposisi di Soviet ter-masuk masalah nasionalisme sangatlah di-larang. Karena itu gerakan-gerakan nasionalisme sampai sebelum masa transisi ke de-mokrasi tidak pernah menjadi besar. dan berpengaruh. Meskipun demikian, pada se-bagian besar masyarakat, perlawanan dalam bentuk-bentuk lain tetap saja hadir seperti menolak berbahasa Rusia di muka umum,, me nentang perkawinan keluarganya dengan suku bangsa Rusia, tetap mempertahankan dua bahasa dalam keluarga, bersimpati pada gerakan-gerakan etnis nasional maupun in-ternasional, dan sebagainya.

Dengan kepentingan dan dendam nasionalisme tersembunyi seperti itu dapat dime-ngeru" sekarang mengapa kepentingan elit-elit etnis untuk melepaskan diri dari Uni Soviet di bawah pemerintahan Gorbachev, didukung oleh berbagai^ strata dalam masyarakat.

Hubungan Pusat dan Daerah di Bawah Pemerintahan Komunis (194-1980)

Semunya integrasi nasional yang terjadi di Uni Soviet juga dapat dikatakan bersumber pada strategi integrastnya secara vertikai.

Yang dimaksud di sini adalah pola penciptaan keterpaduan, stabilitas, dan kepatuhan hubungan antara pusat dan daerah. Dalam mencapai tujuan tersebut telah terjadi ketidakselarasan antara struktur kenegaraan dan struktur pengendalian kekuasaannya.

Dalam konstitusi Uni Soviet yang telah 5 kali mengalami perubahan (1918, 1924, 1936, 1977 dan perubahan sedikit di bawah Gorbachev), secara jelas termuat ketentuan yuridis tentang struktur kenegaraan yang federalistis dan desentralistis. Namun pada pelaksanaannya federalisme Soviet menjadi sesuatu yang unik dan tampak tidak konsisten (antara perundang-undangan dengan pelaksanaan) dibandingkan dengan sistem federalisme di negara lainnya karena berlaku sentralistis.

Keunikan pertama terletak pada pembentukan unit-unit administrasi pemerintahan yang didasarkan atas kesukubangsaan. Tidak hanya pada tingkat federal, akan tetapi juga pada unit-unit yang lebih kecil lainnya, sehingga sistem Soviet ini dikategorikan sebagai suatu federalisme kebangsaan majemuk (*a multi-national federalism*).

Keunikan kedua, unit-unit pemerintahan memiliki otonomi yang tidak sederajat, melainkan terdiri dari hirarkis-hirarkis yang dibentuk atas persentase jumlah kesukubangsaan. Suku bangsa dengan jumlah besar mendapat status yang tertinggi dan disebut *Union Republic* atau negara bagian yang seluruhnya berjumlah 15. Sejumlah suku bangsa yang lebih kecil dikelompokkan dalam unit pemerintahan yang disebut *Republik Otonomus*. Unit-unit ini seluruhnya berjumlah 20 di mana 16 di antaranya berada dalam wilayah Rusia, dua di Georgia, satu di Uzbek, dan satu di Azerbaijan. Unit yang lebih kecil adalah wilayah otonomi (*ov-tonomye oblasti*) yang hanya berjumlah 8. Unit

yang terkecil adalah distrik kebangsaan yang disebut *okrug* (*natsional'nyi okrug*).

*

Seperti disebutkan di atas, sampai kepada unit administrasi yang terkecil sekalipun, 1 dibentuk berdasarkan kesukubangsaan. Se- : hingga kita, dapat di Uni Soviet adanya wilayah otonomi bangsa Yahudi, bangsa Bi-robidzhan dekat perbatasan Cina, Okrug i Chukchi atau Soviet Eskimo, suku bangsa : yang berjumlah hanya sekitar 14.000 orang. Mereka semua dikonsentrasikan dalam wilayah-wilayah sendiri.

Bentuk federalisme seperti di atas tidak dapat dihindarkan berdasarkan janji Bolshevik untuk tetap menghormati kesukubangsaan masing-masing. Tetapi bentuk ini menjadi sangat lemah bila ditinjau dari hajuhan integrasi nasional. Sebab dengan membatarkan konsentrasi suku-suku bangsa pada satu wilayah tertentu banyak faktor akan mendorong kemungkinan negara itu terpecah kembali. Pemerintah pusat berusaha menangkalkan kemungkinan itu dengan melaksanakan manajemen etnik seperti di atas. Tetapi di sini justru letak kelemahannya. Bagaimana mungkin melebur berbagai masyarakat dengan cara asimilasi atau aliansi tetapi tetap mempertahankan komunitas kesukubangsaan? Bagaimana pula dimungkinkan melebur berbagai masyarakat dengan memberikan keistimewaan pada satu suku bangsa? Ini sangat berbeda dengan konsep Amerika Serikat yang membagi federasinya atas dasar teritorial tanpa melihat pada ras dan etnis. Sehingga Amerikanisasi berjalan tanpa ada ras atau etnis yang merasa disisihkan. Memang kemudian terbukti bahwa cara penanganan etnik di Uni Soviet telah gagal dengan melihat bahwa sampai masa akhirnya negara itu terus-menerus menghadapi masalah etnis.

Keunikan ketiga adalah pembentukan badan pemerintahan yang dianggap sebagai

Roy M. Macridts, *Modern Political System: Europe*, New Jersey. Prentice Hall Inc., 1963) him. 506 dan Konstitusi

¹² Gordon B. Smith, *op.cit.*, him. 307.

manifestasi dari penghormatan keberadaan Esukubangsaan. Di 'Union Republik' diben-uk Soviet tertinggi afou *supreme Soviet*, di init yang lebih kecil dengan struktur yang erupa disebut sebagai *Local soviet* atau *soviet*. ikan tetapi pada tingkat pemilihan unit-unit •emerintahan daerah di alas, rakyat tidak liberikan daftar pilihan anggota selain ha-tya menyatakan setuju atau tidak setuju >rhadaap calon yang ditujuk oleh partai. Tntuk menunjukan kedudukan yang tinggi agi negara bagian pferiden di ke-15 negara agian didudukkan sebagai wakil ketua residium (*ex officio*) di Soviet tertinggi.)engan maksud yang sama, salah satu rajelis di Soviet tertinggi dibehtuk dari tusan-utusan daerah. Akan tetapi di kedua ;njang pemerintahan itu, anggotanya tidak wmliliki hak memutuskan kebijaksanaan tau perundang-undangan. Hak tersebut era da pada majelis yang anggotanya 'di imjuk oleh partai'.

Keunikan Keempat terletak pada ketidak 2 la rasa n antara konstitusi dan pelaksanaan-ya. Di dalam konstitusi disebutkan bahwa 'bagai unit administrasi yang paling tinggi, hion Republic' memiliki hak otonomi yang aling luas dibanding dengan unit ad minis-asi lainnya. Unit ini memiliki hak hukum ntuk melepaskan diri (artike 1 72). Menda->atkan otonomi yang luas dengan hak nengbntrol perundang-undangan sendiri wtikel 76), hak untuk mengontrol ekono-ninya sendiri (artikel 77), dan hak untuk lelakukan hubungan diplomasi dan merig-dakan perjanjian-perjanjian internaSionai irtikel 80). Di bawah Konstitusi 1924 bahkan icmpunyai hak untuk mem be ntuk ang-atan bersenjata sendiri. Pada kenyataannya, is tern pemerintahan lebih merupakan nega-a kesatuan yang sentralistis sebab pasal 6 konstitusi Soviet menyebutkan secara tegas jntang kedudukan partai yang berada di tas segala kekuatan maupun unit pemerin-ihan yang ada di negara itu. Dengan etentuan itu tidak satu pun dari republik-2publik yang dapat melaksanakan desen-

tralisasinya sebab semua kebijaksanaan pada akhirnya harus mendapat persetujuan partai, dan kekuatan republik tetap hanya tinggal formalitas belaka.

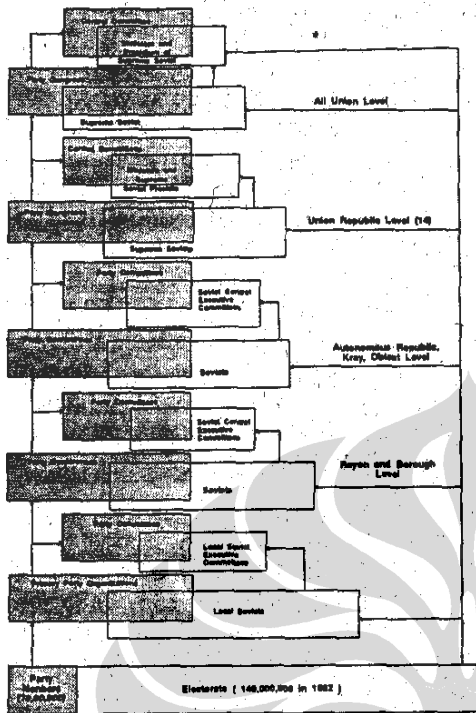
Seluruh keunikan yang memadukan antara sis tern desentralisasi dan sis tern organi-sasi yang monolitik—sentralistis itu di-mungkinkan karena pada pelaksanaan pemerintahan, diciptakan suatu proses "saling kunci" (*interlocking*) antara administrasi pemerintahan dan partai komunis. Di mana di setiap jenjang pemerintahan dikunci oleh pejabat-pejabat partai, sehingga efektifitas-nya tidak hanya terletak pada terpusatnya kendali dan kebijaksanaan tetapi juga pada terkoordinirnya pejabat-pejabat di daerah. Bag aim ana pengorganisasiannya dapat dili-hat dari penjelasan berikutini.

Jika kita menyimak pada gambar 2, terli-hat bahwa semua unit administrasi pemerintahan dikuasai oleh anggota-anggota (yang ditunjuk) Partai Komunis. Pada unit-unit yang lebih kecil, birokrasi dipegang oleh sekitar 30 sampai 60 persen anggota partai. Akan tetapi pada jajaran yang lebih tinggi yaitu Soviet tertinggi, birokrasi dikuasai oleh 75 sampai 85 persen anggota partai. Dengan komposisi semacam itu jelas dapat diatur agar semua kebijaksanaan yang dike-luarkan atau diputuskan oleh badan per-wakilan rakyat/pemerintah daerah adalah kebijaksanaan dari partai, yang berarti pula kebijaksanaan pemerintah pusat.

Kuatnya kedudukan partai dalam pemerintahan Soviet telah pula membawa ekses terhadap pembentukan birokrat-birokrat partai yang memiliki keistimewaan-keistimewaan politik yang berpengaruh terhadap berbagai bidang ke hid up an lainnya. Dari padanya muncul persoalan baru yaitu ada-nya kesenjangan sosial-ekonomi antara rakyat dengan birokrat partai dan mereka yang mempunyai hubungan yang dekat dengan

¹³Roy Macridis, *op.ctt.*, him. 5

ntwtwoeking Party and StM* Strnietw**
In th* SovM Union



Sumber: V. Aspaturtan, "7T> Sovit Union",
ditam R.C. Maendie and R.E. Wwd (Mto.),
Madam Political System: Europt, «dW k'du», 1968

orang-orang partai.¹⁴ Pola sentralisasi dan *interlocking* antara pusat dan daerah yang dilakukan pemerintah komunis bukan terbat as pada birokrasi pemerintahan saja, akan tetapi di semua bidang kehidupan. di orga-nisasi pejrtanian, organisasi industri, ke-senian, olah raga, dan lain sebagainya. Salah satunya yang sangat berpengaruh terhadap ketidakharmonisan hubungan antara pusat dan daerah adalah sentralisasi di bidang ekonomi.

L>i Uni Soviet, anggota-anggota partai atau orang-orang yang dekat (jengan partai bisa memiHki mobil, rumah peristirahatan (*dacha*) atau barang-barang mewah lainnya. Mereka, juga memiliki jatah makanan dan barang dan tempat tinggal yang lebih besar, sementara rakyat biasa tidak.

Periu diketahui, dalam bidang ekonomi, Uni Soviet terpecah ke dalam 2 kelompok perkembangan yaitu utara dan di selatan (Asia Tengah). Di sebelah utara, Rusia meru-pakan negara yang paling besar dan paling kaya dan paling swasembada. Terkaya dalam sumber alam, mempunyai industri modern dan sektor pertanian yang besar., Sekitar 61% dari produksi nasional Uni Soviet dihasilkan dari negara bagian ini. Rusia juga menguasai 91% produksi minyak dan gas alam, 55% produksi batu bara, dan 44% prqduksi biji besi yang memasok kebutuhan seluruh Uni Soviet, Ukraina, republik terbe-sar kedua yang menghasilkan sekita 16% dari produksi nasional, adalah produsen hasil pertanian dan barang barang industri penting serta produsen batu bara dan biji besi yang berarti. Di Rusia juga terletak 10 , dari 18 zona ekonomi terbesar Uni Soviet, tiga lainnya terletak di Ukraina, sedangkan untuk kepentingan perencanaan wilayah, 5 lainnya dikelompokkan dalam republik ke-cil-kecil lainnya.

Di sebelah selatan, perkembangannya ti-daklah sederajat dengan perkembangan di utara. Nilai produksi netto per kapita di Rusia, Estonia, Latvia, Lithuania, dan Beyl-lorusia berkisar 3 sampai 4 kali lebih tinggi dari tingkat di Asia tengah (Turkmenia, Uzbekistan, Tdzikistan dan Kirghizia). Di Republik-republik Asia Tengah yang peng-huninya sebagian besar beragama Islam ini, terdapat kemiskinan yang sangat luas di bandingkan dengan di utara (Baltik, Rusia, Ukraina, dan Beyllorusia). Infrastruktur so-sial seperti sekolah, rumah sakit, tempat penitipan anak, serta pengadaan barang-barang konsumsi di Asia Tengah jauh lebih bufuk dari utara. Seperti disebutkan sebelumnya bahwa sistem ekonomi dilak-'

¹⁵Sumber IMF, 1990.

AlecNove, *TheSoviet Economic System* (London: George Alien and Unwin, Ltd. 1977), him. 17.

Batata Simatupang dalam Komjws, 2pesember 1991.

lakan secara sentralisasi. Pengertian ini •arti, Setiap negara bagian Hdak berhak tuk mengatur hasil-hasil wilayahnya se-a sendiri-sendiri. Seluruh sumber alamupun hasil produksi industri dan per-dan harus dipasok ke pusat, kemudian sat ya'ng membagikan kepada negara-jara bagian berdasarkan penjatahan.

Kebijaksanaan ini menimbulkan ketidak-isan di antara negara bagian yang kaya, ena ini dianggap sebagai pengurusan oleh nerintah pusat untuk melayani kebutuhan nrtperkuat kekuasaannya. Sementara me-a sendiri harus mengurangi kebutuhan-i untuk berbagi dengan wilayah miskln mya. Akibatnya, modal untuk pembangu-i pun semakin langka, sehingga kemajuan ,g diharapkan untuk memperbaiki taraf idupan, kemajuan teknologi, dan industri pamanya, menjadl terhambat. Lebih dari mereka di harus kan memasok ke pusat uk memperoleh dana-dana bantuan bag! ara-negara satelit Uni Soviet dalam ke-gka kebijaksanaan hegemoninya.

)apat dimengerti sekarang, mengapa tun-,n-tuntutan untuk memperoleh hak oto-li dan kemerdekaan lebih dulu da tang i negara-negara bagian yang potential srti Rusia, Ukraina, Beyllorusia, Latvia, mia, dan Lithuania. Selama masa peme-ahan komunis, kedudukan partai sangat-kuat, sehingga hubungan pusat dan rah dapat berjalan dengan amah. Rasa dakpuasan dari negara-negara bagian adap pemerintah pusat, meskipun ada, pi tidak muncul dipermukaan, dan ha-merupakan masalah lokal saja. Hal itu at diredam oleh sis tern *interlocking* yang i disebut di atas. Partai juga mampu ra efektif meredam gerakan-gerakan y menunjukkan rasa ketidakpuasan de-fi sis tern organisasi sel partai, Dalam misasi ini, settap anggota sel bertugas ion i tor sejumlah orang di Hngkungan- sehingga me ru pa kan mata dan telinga ai yang paling terdepan. Dengan sistem

ini, informasi-informasi pembangkangan de ngan cepat dapat diketahui. Partai juga mampu men ah an unsur-unsur ketidakpuas an dengan memegang monopoli infbrmasi dan media massa, sehingga setiap gerakan separatis yang muncul dipermukaan tidak akan pernah dapat didengar oleh penduduk di negara bagian lain.

Munculnya Kelas Baru dan Redupnya Pe-merintahan Pusat

Kita harus mengakui bahwa sejarah pemben-tukan Uni Soviet dan Rusifikasi bukan merupakan faktor-faktor utama penyebab disintegrasi di negara itu. Kedua proses tersebut memang sangat kuat berlaku di masa Stalin. Tetapi setelah itu Uni Soviet .telah 3 kali mengalami pergantian pimpinan politik (yaitu Krushchev, Brezhnev dan Gorbachev, Hdak dihitung masa Andropov dan Chernenko). Dalam kurun waktu tersebut, sedikit banyak telah menumbuhkan elit dan kelas menengah baru di luar elit Partai Komunis.¹⁸ Golongan ini berjumlah sekitar 10%, yang muncul dengan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik modernisasi dalam pendidikan, maupun oleh merembesnya ni-lai-nilai sosial, budaya, ekonomi, dan politik dari dunia di luar wilayah Uni Soviet Pada kelompok ini tumbuh kesadaran-kesadaran baru ten tang hak-hak asasi mereka sebagai warga negara. Muncul suatu kesadaran bahwa yang menjadi kendala dalam hubungan antara elit dan massa atau antara pemerintah pusat dan daerah bukan lagi sekadar Rusifikasi, tetapi lebih kepada sistem sentralisasi dan monopoli dari partai. Sistem yang menyccbakan mereka harus tunduk hanya kepada Partai komunis, sistem yang hanya menghargai individu atau kelompok bukan atas dasar kemampuannya, tetapi atas dasar kebutuhan minimal (penjatahan), sistem

¹⁸Selama ini anggota partai dikJasifikasikan sebagai kelas elit tersendiri, karena wewenang dan keistime-waan yang dimiliki.

yang tidak menghargai hak asasi kemanusiaan dan hak untuk menentukan diri sendiri, sistem yang menyebabkan negara bagian yang kaya hams befbagi dengan negara bagian yang miskin, sistem yang telah menyebabkan stagnasi-stagnasi ekonomi dan sosial di Uni Soviet, dan lain sebagainya. Di bawah pemerintahan komunis, kelompok ini menjadi oposisi yang bergerak di bawah permukaan.

Di bawah pemerintahan Gorbachev yang membenarkan keterbukaan dan demokratisasi, elit dan kelas menengah ini mendapat kesempatan untuk tampil dan ikut berperan serta di dalam menentukan masa depan negara ini. Dalam hal ini, pendapat D. Toqueville, dapat memperkuat argumen di atas. Ia mengatakan bahwa munculnya gerakan-gerakan menentang regim yang opresif, bukan terjadi pada saat regim tersebut berkuasa, tetapi pada saat regim tersebut mulai membuka diri. Pada saat penguasa mulai membenarkan dibentuknya organisasi-organisasi sehingga para pemimpin (elit politik) menemukan akses untuk muncul

secara politis. Dengan kata lain, terbuka suatu kesempatan politik (*political opportunity*), bagi mereka yang selama ini beroposisi di bawah permukaan. Sebagai akibatnya, dalam waktu singkat bermunculan berbagai organisasi dan atiran politik, dan derajat persaingan elit semakin hari semakin meningkat, baik terjadi di tingkat pusat maupun di negara-negara bagian, baik atas nama individu maupun atas garis ideologi yaitu konservatif/komunis, moderat dan radikal kanan. Dalam kerangka ini kemudian issue Rusifikasi dan sejarah pembentukan negeri itu menjadi penting kembali.

Pengertian ini menjadi penting bila kita mengetahui bahwa betapapun besarnya Uni Soviet, betapapun tingkat modernisasi industri ekonomi dan militernya seperti yang

Lihat dalam Sydney Tarrow, *Understanding Political Change in Eastern Europe*, dalam jurnal *Political Science and Politics*, Maret 1991, him, 14.

telah dijelaskan di atas, sebagian besar masyarakatnya masih rendah pendidikan-

nya. Pada masyarakat itu, masih kuat tertanam budaya politik otoriterisme. Massa ini

pada umumnya belum menyadari arti politik;

dan hak pribadi mereka. Mereka lebih bersed-

fat apatis terhadap politik, karena sudah terbiasa takut dan tunduk kepada penguasa.

Massa ini dengan mudah dipengaruhi oleh;

orang-orang yang lebih pandai atau diang-

gap pemimpinya.

(

Keadaan massa ini telah dimanfaatkan oleh elit dan kelompok menengah yang bersaing untuk membentuk opini massa agar, bersimpati dan melegitimasi usaha mereka melawan diri dari dominasi pemerintah pusat Uni Soviet. Dan kebijaksanaan rusifikasi serta sejarah pembentukan Uni Soviet yang banyak menimbulkan luka dan dendam nasionalisme di kalangan massa, menjadi issue yang dapat diandalkan.

Sampai di tahun 1990, meskipun persaingan elit sudah semakin kritis, Gorbachev: masih mampu mempertahankan keutuhan Uni Soviet. Konsolidasi kekuatan yang diupayakan olehnya berjalan dengan mulus.

Berbagai individu yang dianggap mengganggu reformasinya dapat

disingkirkan olehnya, misalnya G.

Romanov atau Li-gachev yang

dianggap terlalu kanan, atau I Yeltsin

yang dianggap terlalu kanan (sebelum

ia keluar dari PKUS dan ikut dalam;

pemilihan presiden Rusia). Persaingan elit

di pusat menimbulkan keberanian negara-

negara bagian untuk bergerak, sehingga

muncul kasus-kasus pertentangan etnis

dan tuntutan; otonomi serta

kemerdekaan. Dalam situasi; yang

demikian rawan, Gorbachev masih

mencoba mempertahankan stabilitas dan

keutuhan Soviet dengan membentuk

Dewan Negara Bagian (*Council of*

Federation) yang anggotanya berasal dari

negara-negara bagian, dan Dewan

Keamanan Nasional (*Security Council*).

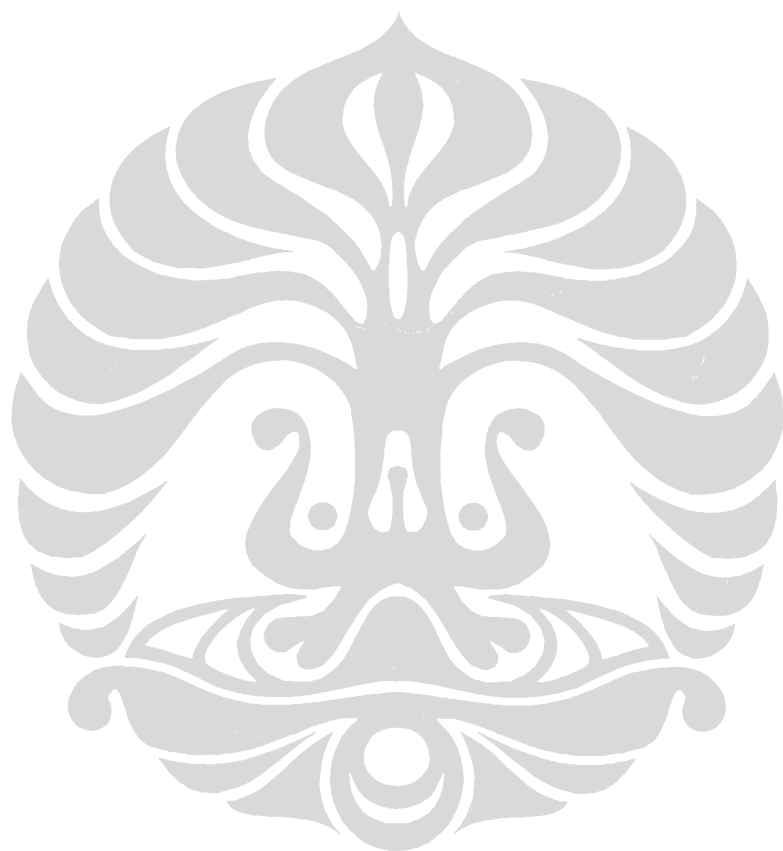
Dengan jaminan anggota Dewan Negara

Bagian, ia berencana mengadakan

referendum untuk menentukan

kelestarian Uni Soviet. Ia juga telah

menawarkan
80



Treaty yang menjamin hak dan derajat yang sama bagi negara bagian di segala bidang. Akan tetapi semua itu diperlemah kembali oleh semakin menajamnya konflik di tingkat pusat. Konflik yang meliputi perbedaan pendapat tentang cara menyelesaikan Uni Soviet. Kelompok radikal me-*iduh* Gorby terlalu lambat, sementara umum konservatif menganggap ia terlalu jauh ke arah kanan. Dua kelompok ini pada akhirnya saling bersaing untuk menjatuhkan Gorbachev. Kelompok radikal konservatif melakukan kudeta di bulan Agustus 1991, kemudian digagalkan oleh kelompok radikal lain. Tetapi setelah itu, proses disintegrasi Soviet pun mencapai klimaksnya. Mengapa proses ini menjadi besar dan lepas dari kendali?

Jawaban yang paling tepat untuk hal ini adalah disebabkan karena kelemahan pemerintahan pusat, dalam hal ini Gorbachev, mengatasi keadaan. Ia memang sudah tidak dapat berbuat ketika elit penguasa banyak terpecah setelah kudeta tersebut. Kelemahan ini semakin ditopang oleh situasi di dalam negeri Soviet sendiri. *Pertama* tentu saja keruntuhan ekonomi Soviet, sehingga pemerintah pusat di satu sisi tidak lagi memiliki kemampuan untuk memberikan subsidi kepada wilayah-wilayah yang miskin. Di lain pihak pemerintah pusat juga tidak dapat membiayai produksi dan pengembangan teknologi di wilayah-wilayah industri. Bila secara ekonomi pusat sudah tidak dapat mengikat negara-negara bagian, secara kausal, hilang pula kendali politik.

Kedua adalah terpecahnya kelompok militer yang membawa kehancuran kejayaan angkatan Bersenjata Uni Soviet. Sebagian di bawah pengaruh Gorbachev, sebagian di bawah pengaruh konservatif, sebagian lagi mengklaim oleh para pemimpin negara-negara bagian seperti Rusia, Moldova, Georgia, dan Ukraina.

Yang *ketiga* adalah keberhasilan golongan di pihak kanan mendesak Gorbachev meng-

hapus konstitusi Pasal 6 dan menjadikan partai komunis sebagai partai parlemen bi-asa yang tidak memiliki kekuasaan monopoli lagi.

Setelah kudeta itulah seolah-olah telah terjadi kekosongan kekuasaan di Uni Soviet. Sebab komunisme dibubarkan, militer kehilangan komando, Gorbachev sendiri terancam oleh popularitas Yeltsin di negara bagian Rusia (yang dominan dan terbesar). Tidak ada lagi kekuatan represif yang selama ini disegani oleh seluruh masyarakat dan negara bagian. Tidak juga ada kesatuan ideologi yang dapat mengikat mereka.

Dalam satu minggu sesudah kekosongan kekuasaan itu, Uni Soviet terpecah ke dalam 15 negara yang memproklamkan kemerdekaannya. Gorbachev segera membujuk negara-negara bagian dengan membentuk lembaga baru yang disebut sebagai Dewan Negara. Lembaga ini memiliki kekuasaan yang jauh lebih besar dari dewan yang lama. Untuk mengatasi masalah ekonomi ia membentuk Dewan Ekonomi Antar-Negara Bagian/ yang mengkoordinir masalah-masalah ekonomi negara bagian.

Akan tetapi pernyataan pengunduran diri Ukraina dari konfederasi Uni Soviet telah mendorong Yeltsin, saingan utamanya sejak bertahun-tahun yang lalu, membentuk Negara Persemakmuran Merdeka bersama Ukraina dan Belorussia. Dengan lepasnya 3 negara utama penopang kehidupan Uni Soviet, posisi Gorbachev sudah sampai pada titik yang paling lemah, sehingga apa lagi yang harus diperbuat oleh pemerintah Pusat?

Fenutup

Dari berbagai faktor yang telah diungkapkan di atas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Integrasi nasional tidak pernah tercapai secara alamiah di Uni Soviet. Manajemen etnik (yang lebih menekankan pada *S/ra-nii* dari pada *Sblizhenie*) dan hubungan

antara pusat dan daerah yang diciptakan pemerintahan komunis selama ini tampaknya hanya menumbuhkan integrasi politik yang semu di antara rakyat mau-pun kelompok elit (nonpartai) di Uni Soviet. Sebab proses menumbuhkan kepatuhan dan konsensus di antara masyarakat yang menjadi prasyarat integrasi, diperoleh melalui sistem hubungan yang sentralistik, monopolistik, dan otoriter.

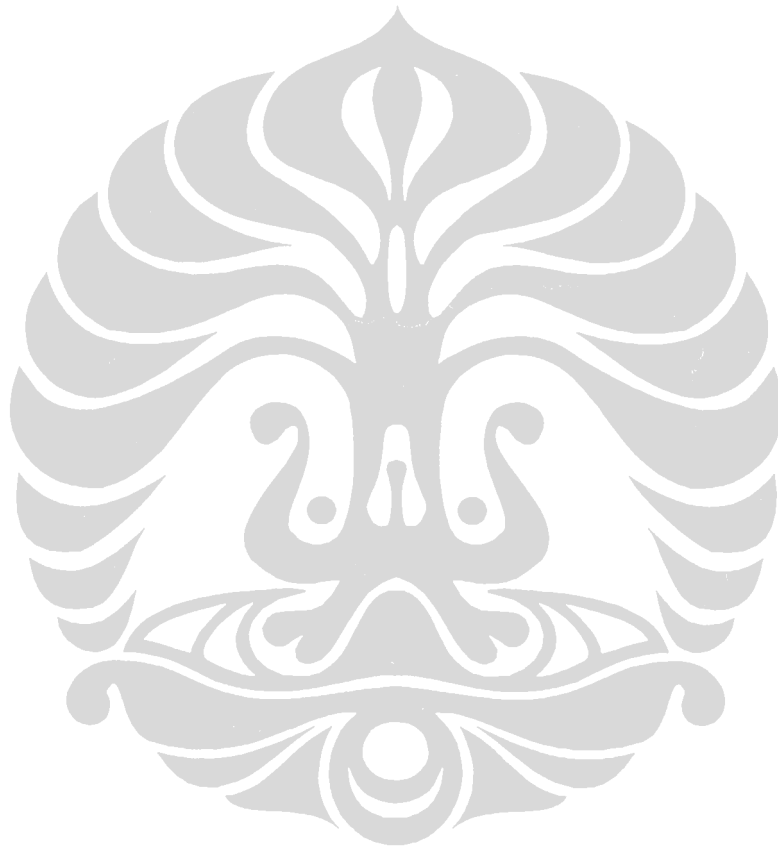
2: Sudah sejak periode pemerintahan komunis, manajemen etnik dan sejarah pembongkaran Uni Soviet tidak dapat dianggap sebagai faktor utama yang memicu pertikaian, tetapi tetap mempunyai peranan yang berpengaruh. Meningkatnya masalah etnik di bawah periode Gorbachev lebih banyak dipengaruhi oleh kemunculan kelas menengah dan elit baru di Uni Soviet. Kelompok ini memperoleh kesempatan tampil secara politik di periode keterbukaan dan demokratisasi, tetapi mengalami konflik akibat perbedaan pandangan dalam mengatasi masalah ekonomi dan sosial dalam negeri. Konflik yang dimaksud terjadi secara vertikal yaitu antara elit di pusat dan negara bagian* juga secara horisontal yaitu antara sesama elit di pusat dan atau antarsesama elit di negara-negara bagian (yang tampak sebagai kerusuhan etnik). Konflik-konflik tersebut memuncak ketika kelompok komunis yang selama ini dominan didesak hak hidupnya oleh kelompok tengah dan radikal kanan, kemudian melakukan kudeta. Setelah Kudeta, Uni Soviet mengalami kekosongan kekuatan politik (*Vacuum of Power*) yang membentuk situasi ketidakpastian aturan main dan siapa pengendali kekuasaan di pusat. Oleh karena kepatuhan yang ada selalu ini terkait dengan faktor kekuatan pusat, maka melemahnya kekuatan itu menyebabkan melemah pula tingkat kepatuhannya.

3. Munculnya Persemakmuran Negara Mer-deka (CIS) dapat dianggap sebagai tingkat lanjut dari pereingan elit, dalam hal ini Gorbachev dengan Yeltsin, yang terhenti sejenak pada saat Yeltsin mendukungnya kembali ke puncak kekuasaan. Tetapi perjuangan Yeltsin saat itu nampaknya lebih disebabkan oleh ketakutannya akan kembalinya komunisme dan menarik simpati dunia Barat yang pudar akibat tindakan rasial Yeltsin (sudah lama terbaca oleh negara Barat bahwa Yeltsin ingin mengembalikan kejayaan 'Tzarisme' Rusia di atas ras-ras lainnya). Oleh karena itu terbentuknya CIS dapat dianggap sebagai pengambilan kekuasaan secara tidak sah (kudeta fihak berdarah) oleh Yeltsin. Dugaan itu diperkuat dengan melihat bentuk CIS yang merupakan perwujudan dari *Union Treaty* Gorbachev,

4. Dengan melihat kepada apa yang terjadi sekarang ini, penulis mencoba untuk meramalkan bahwa, Yeltsin akan mengalami kesulitan mendapatkan bentuk pengaturan antarnegara yang dapat menjamin stabilitas dan keutuhan CIS. Sebab nampaknya tindakan Yeltsin yang cenderung menekan dan ingin mengambil alih semua aset bekas Uni Soviet termasuk ekonomi dan militernya, dapat mengembalikan citra penyimpang Partai Komunis yang selama ini membuat rawan dan semunya kepatuhan negara-negara bagian Uni Soviet. Yaitu penyimpangan terhadap ketentuan hak kemerdekaan dan menehtukan nasib sendiri bagi negara-negara bagian. Dugaan yang timbul adalah, ia mencoba membangun dominasi Rusia di atas negara lainnya, terutama ekonomi dan militer, dengan demikian akan terbentuk ketergantungan negara-negara lain pada Rusia. Seperti disebut sebelumnya, kekuatan ekonomi terbesar ada pada Rusia. Masuknya? negara bekas Uni Soviet lainnya ke dalam

CIS juga disebabkan karena tanpa 3 negara pendiri CIS, ke-7 negara lainnya akan menemui kesulitan untuk berdiri sendiri. Lagi pula masuknya ke-7 negara bagian lainnya (mayoritas di selatan) dianalisis sebagai hasil pembicaraan Gorbachev dengan Nur Sultan Nazarbayev, presiden Kazakhstan, pendukung keras bekas Presiden Soviet itu. Dari sini ke-mudian rimbudugaan bahwa pengelompokan CIS dianggap oleh Gorbachev

tetep merupakan penvujudan pengelompokan negara Soviet yang tidak berbeda dengan ide *Union Treaty-nya*. Mungkin ia berharap, Yeltsin akan gagal mempertahankan CIS, dan ia akan mempersahikan dan menghadirkan kembali Uni Soviet dalam peta politik dunia. Itu sebabnya, dalam pidato perpisahannya sebagai presiden Uni Soviet ia mengatakan: "*Soya menyimpanrencanabesar*"



gara-negara yang tergabung , dalam CIS adalah: i, Ukraina, Beyllorusia, Kazhakstan, Azerbaijan, iizia, Armenia, Turkmenia; Uzbekistan, Tajikistan, tainnya yaitu Estonia, Latvia, dan Lithuania masih n taraf mempertimbangkan, sementara Georgia dan lovia belum bereedia masuk.